

PENTINGNYA STRATEGI APITALAU DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEDESAAN¹

Oleh : **Jandri h. Rellua**²

ABSTRAK

Masalah keterbelakangan dan kemiskinan masih menghantui masyarakat Indonesia terlebih pada masyarakat yang berada di pedesaan kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan, sarana pendidikan, dan lain sebagainya mengakibatkan memperburuk keadaan masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah pedesaan, yang tentunya membutuhkan sentuhan pengelolaan pemerintahan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dari keterbelakangan yang tentunya perlu dicari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Upaya untuk menagani masalah keterbelakang masyarakat tersebut maka perlu ada metode atau cara untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan strategi pola perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi organisasi, Sstrategi pola perspektif, di mana strategi dalam membentuk misi, serta strategi pola kegiatan, di mana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian pada pelaksanaan kerja.

Peran Apitalau dengan menerapkan pola strategi tersebut terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa Kuma Selatan Kabupaten Talaud.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah , dan Pembangunan Infrastruktur

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa tersebut pada hakekatnya ialah bagaimana Pemerintah Pusat merespon keinginan dan aspirasi masyarakat di daerah maupun desa, sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut. Melalui otonomi daerah, masyarakat diberikan peranan yang sebesar-besarnya, dan peran

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

tersebut diberikan dalam bentuk kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri sehingga diharapkan akan terbentuk masyarakat yang bermartabat, sejahtera dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

UU no 6 tahun 2014 tentang desa mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah desa tentang pembangunan Peraturan pemerintah no 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, merupakan penjabaran mengenai pengaturan-pengaturan tentang Desa yang mana salah satunya pengaturannya mengenai tugas dan tanggung jawab dari pada pemerintah dalam merencanakan dan merumuskan masukan masyarakat tentang pembangunan infrastruktur sebagai bentuk harapan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan nyaman dalam menjalani dan mempertahankan hidupnya, untuk itu masyarakat tentunya memerlukan sarana dan prasarana infrastruktur sebagai tempat untuk melaksanakan dan untuk menunjang aktivitas masyarakat berupa akses dalam memobilisasasi setiap aktivitas kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mendasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, air bersih, dan saluran drainase dan infrastruktur lainnya.

Desa Kuma kecamatan Essang kabupaten Kepulauan Talaud jauh dari harapan ada banyak persoalan-persoalan, Pembangunan Infrastruktur yang belum direalisasikan seperti masih kurangnya dan tidak merata sambungan pipa saluran air Bersih, jalan desa masih banyak yang rusak, Saluran Air(drainase) yang mandek, yang tentunya membutuhkan sentuhan pengelola atau yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang tentunya dengan harapan dapat membawa berkah bagi masyarakat yang ada di desa Kuma, untuk mengatasi permasalahan diatas sangat dibutuhkan pemimpin yang dapat mengayomi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat dalam membangun wilayah pedesaan di desa Kuma kecamatan Essang Kabupaten Talaud, yang banyak potensi sumber daya alamnya tetapi minim sarana prasarana infrastruktur pedesaan, hal ini tentunya membutuhkan strategi dari Apitalau sebagai seorang pemimpin yang diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana amanat Undang-undang untuk mengakomodir

harapan dan keinginan dari masyarakat tersebut dalam ketersediaan infrastruktur yang ada di desa Kuma kecamatan Esang Kabupaten Talaud

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“Strategi Apitalaudalam pembangunan infrastruktur di desa Kuma, Kecamatan Essang kab.Kep.Talaud.***

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka, sehubungan dengan penelitian ini, peneliti mengemukakan rumusan masalah penelitian yang akan dikaji yaitu : “ Bagaimana Strategi Apitalau dalam pembangunan infrastuktur di desa Kuma selatan kabupaten Talaud ?”

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Strategi Apitalau dalam pembangunan infrastuktur di desa Kuma selatan kabupaten Talaud, Dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis dengan metode penelitian kualitatif dengan data yang dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Strategi Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengembangan Desa

Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu rencana pimpinan pucuk yang berfokus jangka panjang organisasi, di sertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai. Dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai tindakan yang bersifat ingkramental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Henry Mitsberg dalam (BILL SCOT: 2) mendefinisikan srategi sebagai 5P dan dalam kajian ini dilihat dari yaitu strategi sebagai perencanaan dalam hal menentukan tujuan dari arah pembangunan yang ada, strategi sebagai pola kegiatan Dimana strategi dibentuk sebagai suatu pola dalam melaksanakan suatu kegiatan dan sebagai perspektif strategi menggambarkan pespektif kepada semua aktivitas.

1. Strategi perencanaan

a. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah Desa, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide.

Salah satu strategi pemerintah atau langkah yang di tenpuh oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat terhadap pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat.

Cara ini sangat baik, karna sangat efektif bila dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat salalu dilibatkan. Sehingga peran serta dari masyarakat itu terlibat dari apa yang kemukakan oleh masyarakat. Sehingga secara tidak langsung masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perkembangan pembangunan di Desa. Apa yang masyarakat inginkan bisa dipenuhi bersama terutama masalah pembangunan.

Dalam hal in cara yang demikian mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut bekerja. Dan juga dapat meningkatkan pemahaman dari masyarakat bahwa dalam proses pembangunan dalam desa peran serta dari masyarakat selalu menjadi yang utama partisipasi dari masyarakat merupakan hal yang sangat fundamental dalam proses pembangunan di desa.

Cara yang demikian juga dipahami oleh pemerintah adalah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat karena dari hal ini muncul pokok-pokok pikiran dari masyarakat yang menurut pemerintah bisa menjadi sebuah program yang langsung bersentuhan langsung dengan mereka (masyarakat).

b. Melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat

Pemerintah merupakan suatu organ yang bertanggung jawab atas keharmonisan kehidupan masyarakat. Sehingga cara atau strategi dari pemerintah desa yang mana dengan melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat atau melakukan hubungan secara persiasif kepada msyarakat di pandang sangat baik.

Karena pada dasarnya seorang pemimpin merupakan teman dari semua masyarakat yang ada

Proses pendekatan dengan masyarakat persuasif merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah, karena masyarakat adalah tanggung jawab penuh dari pemerintah desa. Pendekatan ini bisa dikatakan lebih baik dibandingkan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaan musyawarah.

Langkah ini dirasa lebih efektif, karena disana kepala desa atau Apitalau mendengarkan langsung apa keluhan dari masyarakat. Sehingga dia bisa mencari solusi atau langkah yang mampu mengatasi masalah itu. Sehingga rasa percaya masyarakat terhadap Apitalau itu ada.

Setelah melakukan penelitian dengan melihat langsung dan melakukan wawancara dengan beberapa unsure baik dari pemerintah desa aparaturnya. Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat. Strategi dari pemerintah tersebut berjalan dengan sangat baik.

2. Strategi Perspektif membentuk misi dan menggambarkan kepada semua aktifitas

Keberhasilan dalam suatu pembangunan di masyarakat seringkali dipengaruhi oleh tipikal dari seorang pemimpin. Karakter dari seorang pemimpin sangat berpengaruh pada peran serta masyarakat. Oleh karena itu kepedulian seorang pemimpin terhadap warganya atau masyarakat sangat diperlakukan. Oleh karena itu faktor public figure yang ada dalam diri seseorang pemimpin sangat penting. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan selalu dihubungkan dengan keaktifan aparaturnya pemerintah dalam proses pembangunan. Artinya bahwa dalam proses pembangunan keterlibatan aktif dari aparaturnya pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian dalam suatu desa.

Peran aktif dari pemerintah merupakan salah satu bentuk motivasi dari masyarakat untuk ikut dalam pembangunan. Indikator penilaian masyarakat kepada pemerintah ialah dimana pemerintah atau Apitalau Desa menjadi pelaksanaan kegiatan. Atau memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan

pembangunan kepada seluruh masyarakat. Apa yang ia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan inilah salah satu indikator penilaian masyarakat terhadap Apitalau.

3. Strategi kegiatan yaitu pelaksanaan kinerja

a. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Proses pembangunan di desa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Di karenakan masyarakat merupakan alat untuk menunjang suatu pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu rangkaian yang tidak terlepas dari jalannya perkembangan suatu desa. Dalam pelaksanaan pembangunan biasanya masyarakat selalu ikut berkontribusi didalam pembangunan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ialah memberikan bantuan secara langsung atau menjadi pelaksana atau bekerja dalam kegiatan pembanguan salah satunya ialah terjun langsung menjadi pelaku atau bekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ialah memberikan bantuan secara langsung atau menjadi pelaksana atau bekerja dalam kegiatan pembangunan desa. Biasanya bantuan dari masyarakat ada berbagai bentuk atau macam salah satunya ialah terjun langsung menjadi pelaku atau pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian di lokasi tempat penelitian didapati bahwa memang betul dalam setiap program yang disiapkan oleh pemerintah desa bentuk sumbangsi atau partisipasi dari masyarakat yaitu ikut langsung dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Kegiatan dalam bentuk pengumpulan uang, material dan lainnya

Bentuk sumbangsi dari masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan bukan hanya terjun langsung menjadi bagian dalam setiap kerja bakti atau tidak selamanya partisipasi dari masyarakat itu terjun langsung dalam kegiatan. Tapi ada juga bentuk lain masyarakat untuk memberikan sumbangsi

kepada pemerintah desa untuk keperluan proses pembangunan yaitu dengan memberikan bantuan bahan-bahan material, sembako dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kelangsungan kehidupan bersama antara semua unsure yang ada di desa. Pemberian diri dari anggota masyarakat dalam proses pembangunan bisa juga berupa memberikan bahan material untuk kegiatan pembanguann. Arena seringkali dalam pelaksanaan pembangunan ada masyarakat yang merasa mampu memberikan bahan-bahan tersebut, mereka memberikannya dengan sukarela.

Memberikan sumbangan langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan merupakan sara lain masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Hal ini disebabkan juga karena ada sebagian dari masyarakat yang mungkin karean ada kesibukan lain sehingga tidak sempat atau tidak bisa langsung bersama-sama dengan warga lain untuk memebantu warga lain dalam proses pembangunan dan ada juga warga masyarakat yang merasa mampu menyediakan bahan material dan yang lain mereka memeberikan dengan sukarela seperti:

1. Memberikan material
2. Memberikan uang
3. Memberikan sembako (air mineral, makanan dll.)

Cara ini merupakan salah satu bentuk keterbebanan masyarakat terhadap kemajuan desa. Ini siakibatkan karena ada sebagian masyarakat pada tempat pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan ada acara atau kegiatan lebihprioritas sehingga dengan memberikan bahan-bahan seperti itu di anggao mewakili yang bersangkutan untuk ikut dalam kegiatan tersebut.

Dengan cara demikian masyarakat menganggap bahwa dia tidak ikut langsung dalam proses kegiatan pembangunan setidaknya mampu menutipi kebutuhan yang di perlukan dalam oroses kegitan. Sehingga walaupun dia tidak terjun langsung melaksanakan kegiatan pembangunan cara ini mampu mengatasi masalha yang kemungkinan timbul dalam proses pelaksanaan kegiatan berlangsung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur disuatu desa pada dasarnya yang memegang pada proses pembangunan ialah pemerintah.
2. Strategi dalam Pembangunan yang dibuat pemerintah Desa Kuma Selatan dalam pembangunan infrastruktur ialah :
 - a. Strategi perencanaan
 1. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan mendengarkan ide-ide atau pokok-pokok pikiran yang dikemukakan masyarakat.
 2. Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.
 - b. Strategi Perspektif Menjadi pelaku utama atau memberikan contoh yang baik juga merupakan langkah yang efektif karena dengan cara ini ada criteria penilaian dari masyarakat bisa pemerintah penuhi.
 - c. Strategi Pola Kegiatan dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunanyang bentuknya anantara lain :
 1. Masyarakat memberikan sumbangsi kepada pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan yaitu berupa ikut terjun langsung bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan atau pekerjaan.
 2. Memberikan bahan material untuk pembangunan, memberikan uang untuk menyokong pelaksanaan pembangunan dan memberikan makanan, minuman dan lain sebagainya.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran agar proses pengembangan strategi untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat yaitu :

1. Pemerintah harus lebih memantapkan diri lagi untuk menciptakan suatu strategi-strategi yang baru dan baik dengan tujuan memajukan pembanguan di Desa Kuma Selatan .
2. Harus lebih meningkatkan Susana yang kondisif dan paling tidak pemerintah harus menjaga jati dirinya sebagai pemegang kendali dalam pembangunan

- terutama dalam hal anggaran agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk mengelola proses pembangunan di Desa.
3. Pemerintah desa harus selalu melakukan kerja sama dengan BPD sehingga hubungan antara kedua lembaga ini saling mendukung satu sama lain.
 4. Perlu adanya transparansi dari pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan untuk menjadikan pola pikir masyarakat kearah positif dan tidak berpikiran negative kepada pemerintah.
 5. Masyarakat harus memahami dan menjadi diri mereka berguna bagi pembangunan desa Kuma Selatan. Sehingga akan menciptakan kemajuan dan kemakmuran desa Kuma Selatan yang terencana.
 6. Suasana harmonis antara pemerintah, BPD dan tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri harus tetap menjaga semboyan “Samsiote Sampate-pate” yang berarti Berdiri Sama Tinggi, Duduk Sama Rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- B.N. Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bratakusuma S Deddy, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. *Bill Scot (2002) Strategi dan teknik negosiasi , Pustaka Binaman*
- Hunger.D.J., dan Wheelen .T.L. (2001).Manajemen Strategis. Alih bahasa, Julianto Agung*
- Labolo M, 2004, *Format Baru Pemerintahan Desa*, Jurnal Pamong Praja, edisi 4 tahun 2006, Forum Komunikasi Alumni - IIP, Jakarta.
- Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah no 43 tentang petunjuk pelaksanaan pemerintahan desa.